



PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU

#AKHLAK

#bangga  
melayani  
bangsa

# RINGKASAN

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2024



**Ir. SADALI IE, M.Si., IPU**

*Pj. Gubernur Maluku*

## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

### 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio).

Untuk menyajikan capaian kinerja makro, Pemerintah Provinsi Maluku menggunakan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi Maluku pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Capaian Kinerja Makro Atas Indikator-indikator Kinerja Makro**  
**Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,75	73,40	0,89
2	Angka Kemiskinan	16,42	16,05	-0,22
3	Angka Pengangguran	6,31	6,11	-0,31
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,21	5,34	0,24
5	Pendapatan Per kapita	30,46	32,20	0,71
6	Ketimpangan Pendapatan	0,288	0,282	-0,20

**Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2025**

### 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pelayanan dasar ini termasuk dalam urusan wajib pemerintahan yang terdiri dari :

## 1) Urusan Pendidikan

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Maluku pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	81,38	78,94
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	54,15	59,03

### B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Pada tahun anggaran 2024 urusan pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.243.110.847.152,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.194.414.981.773,05 atau mencapai 96,08%. Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
  - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
  - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - c. Pengelolaan Pendidikan Khusus.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - a. Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

- Data Anak Tidak Sekolah (ATS) belum terintegrasi dengan Dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata;
- Pengumpulan data belum optimal karena dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia;
- Belum semua admin Dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah;
- Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi Dapodik secara berkala.
- Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia;
- Belum sepenuhnya terlaksana penerapan SPM.

## 2) Urusan Kesehatan

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi Maluku pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan	1,53	1,36
2.	Persentase Rumah Sakit rujukan Provinsi yang terakreditasi	93,33	100
3.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	100	100
4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	100	100

### B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Pada tahun anggaran 2024 urusan Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.321.573.542.177,00 dengan realisasi sebesar Rp.263.646.841.733,00 atau mencapai 81,99%. Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
  - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
  - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
  - d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
  - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.

### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi urusan kesehatan antara lain :

- Masih rendahnya pengelolaan data dan informasi dalam penanggulangan krisis kesehatan. Perlu adanya review/refreshing sistem manajemen data dan informasi krisis kesehatan;
- Belum maksimalnya rekrutmen tenaga cadangan kesehatan di Provinsi, sehingga perlu di sosialisasikan kembali tentang Emergency Medical Team dan tenaga cadangan penanggulangan krisis kesehatan;

- Masyarakat menolak diimunisasi ketika terjadi KLB PD3I.

### 3) Urusan Pekerjaan Umum

#### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Provinsi Maluku pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	13,30	4,32
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	23,02	38,30
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	43,30	74,90
4.	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100	0
5.	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	100	0
6.	Rasio kemantapan jalan	50,17	53,22
7.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	12	11,2

#### B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Pada tahun anggaran 2024 urusan pekerjaan umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp.218.802.509.481,00 dengan realisasi sebesar Rp.195.853.561.569,00 atau mencapai 89,51%. Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - a. Pengelolaan SDA dan Bagunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000Ha – 3000Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Lintas Kabupaten/kota.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
  - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota di kawasan Strategis Provinsi.
4. Program Penataan Bangunan Gedung
  - a. Penataan dan Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
5. Program Penata Bangunan dan lingkungannya
  - a. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penyelenggaraan Jalan
  - a. Penyelenggaraan jalan provinsi;
  - b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI) cakupan daerah provinsi;
  - c. Kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi.
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - a. Penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasin pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi.

### **C. Permasalahan Yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi urusan pekerjaan umum antara lain :

- Kondisi geografis Provinsi Maluku yang bergugusan kepulauan yang membuat pelaksanaan penyedia pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dan air minum curah lintas Kabupaten/Kota belum dibangun karena membutuhkan pendanaan yang cukup.

## **4) Urusan Perumahan Rakyat**

### **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku**

#### **A. Capaian Kinerja Outcome**

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat yang diperoleh oleh Provinsi Maluku pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2024</b>
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah	11,11	0

	layak huni		
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0
3.	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	0,19	0
4.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	0

### **B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat**

Pada tahun anggaran 2024 urusan perumahan rakyat mengalokasikan anggaran sebesar Rp.16.875.205.961,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.252.298.978,00 atau mencapai 78,53%. Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan
  - a. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi.
2. Program Kawasan Permukiman
  - a. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10Ha sampai dengan di bawah 15Ha;
  - b. Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh dengan luas 10Ha sampai dengan di bawah 15Ha;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  - a. Urusan penyelenggaraan PSU permukiman.

### **C. Permasalahan yang dihadapi urusan perumahan rakyat antara lain :**

- Permasalahan kebutuhan rumah akibat bencana yang mengalami kerusakan sebanyak 886 unit yang tersebar di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku sejak 2023, keterbatasan anggaran sehingga belum adanya penanganan atau intervensi dari Pemerintah Provinsi Maluku.

## **5) Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat**

### **A. Capaian Kinerja Outcome**

Capaian kinerja urusan ketentraman umum perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Provinsi Maluku pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2024</b>
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100

3.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100
4.	Persentase penanganan pra bencana	81,81	81,81
5.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	27,27	27,27

## B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum Perlindungan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2024 urusan ketentraman umum perlindungan masyarakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp.13.911.190.005,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.715.585.440,00 atau mencapai 98,59%. Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
  - a. Pelayanan informasi rawan bencana provinsi;
  - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - c. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana;
  - d. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah provinsi;
  - b. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Gubernur Pergub;
  - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
  - a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

## B. Permasalahan Yang Dihadapi

- Pemda Provinsi Maluku belum membuat aturan terkait penganggaran kegiatan pelayanan kerugian materil dan kerugian pelayanan pengobatan bagi warga negara yang terkena dampak dari penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
- Penganggaran SPM di OPD pengampu belum proporsional antara untuk pemenuhan SPM dan non SPM;
- Belum optimalnya penerapan SPM di lapangan oleh bidang teknis pelaksana penegakkan Perda/Perkada di OPD pengampu SPM Trantibum Provinsi Maluku, sehingga berimplikasi pada laporan penerapan SPM;
- Urusan Kebencanaan merupakan bagian dari Sub Urusan Trantibumlinmas, sementara masing-masing urusan memiliki regulasi yang berbeda yakni Permendagri 101/2018 (Bencana), Permendagri 102/2018 (Damkar) dan Permendagri 114/2018 (Trantibumlinmas);

- Dalam Pelaporan capain SPM Provinsi pada laporan e-spm , urusan kebencanaan masuk pada TRANTIBUM namun tidak terdapat indikator pelayanan SPM urusan kebencanaan (BPBD), hanya terdapat indikator pelayanan SPM urusan trantibum (SATPOL). Untuk Indikator SPM Kebencanaan dilaporkan oleh BPBD Kabupaten/Kota;
- Didalam pelaporan e-spm, untuk urusan kebencanaan hanya dapat melaporkan terkait kegiatan dan anggaran SPM saja;
- Belum terupdatenya kegiatan/sub kegiatan sesuai nomenklatur terbaru (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023) pada pelaporan SPM sub urusan bencana;
- Kurangnya pemahaman aparaturnya dalam implementasi penerapan SPM sub urusan bencana.

## 6) Urusan Sosial

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Provinsi Maluku pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	19,15	86,48
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	20,19	65,33
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	89,93	47,94
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50	100
5.	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	0	0

### B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Pada tahun anggaran 2024 urusan sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp.27.450.745.126,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.866.939.862,00 atau mencapai 86,94%. Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
  - a. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
  - a. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Rehabilitasi Sosial
  - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
  - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti penyediaan makan;
  - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
  - d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti;
  - e. Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a. Pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
  - b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi pengelolaan fakir miskin lintas Kabupaten/Kota.
5. Program Penanganan Bencana
  - a. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi.

### **C. Permasalahan Yang Dihadapi**

- Pada pelaksanaan SPM di Dinas Sosial Provinsi Maluku hanya menjalankan beberapa indikator saja, hal itu sesuai dengan hasil assesment dan anggaran yang tersedia;
- Tidak adanya Panti Disabilitas untuk menjawab SPM pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;
- Pada Program Penanganan Bencana khususnya Penyediaan Permakanan tidak terealisasi, dikarenakan tidak terjadi bencana di Tahun 2024, sehingga anggaran Penyediaan Permakanan digunakan untuk pembayaran TPP Dinas Sosial Provinsi Maluku untuk bulan September dan Oktober Tahun 2024;
- Belum bisa sepenuhnya melaksanakan SPM yang berhubungan dengan Gelandangan dan Pengemis, dikarenakan di Provinsi Maluku tidak ada Panti Gelandangan dan Pengemis sesuai kewenangan. Pemerintah Provinsi Maluku hanya bisa menerapkan SPM untuk Gelandangan dan Pengemis apabila terdapat Panti Gelandangan dan Pengemis (GEPENG).

## **3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

### a) Hasil EPPD Tahun sebelumnya

- Hasil EPPD atas LPPD Tahun 2023 sampai dengan saat ini belum diumumkan. Sementara hasil EPPD atas LPPD Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota Tahun 2022, berada pada urutan 26 dengan skor 2,7298 dan status kinerja SEDANG.

b) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, dengan Nomor : 1.A/HP/XIX.AMB/05/2024 Tanggal 02 Mei 2024, berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### 4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (Unaudited) tahun 2024, Realisasi pendapatan Provinsi Maluku 2024 mencapai sebesar Rp.3.081.621.610.890,67 dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 mencapai Rp.3.030.373.755.716,66.

Secara rinci, rincian anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 berdasarkan pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

KODE REKUNING	JENIS PENDAPATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI %
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.276.879.595.646,00</b>	<b>3.081.621.610.890,67</b>	<b>94,04</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>834.674.802,00</b>	<b>652.248.157.346,67</b>	<b>78,14</b>
4.1.02	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	551.164.095.518,00	537.682.737.377,00	97,55
4.1.04	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	49.590.987.600,00	28.220.404.387,00	56,91
4.1.03	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	63.050.867.181,00	34.366.552.156,00	54,51
4.3.01	<b>Lain-Lain PAD yang Sah</b>	170.868.852.347,00	51.978.463.426,67	30,42
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.441.784.793.000,00</b>	<b>2.429.052.777.544,00</b>	<b>99,48</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.441.784.793.000,00	2.429.052.777.544,00	99,48
<b>5.1</b>	<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>70.430.943.000,00</b>	<b>77.418.872.922,00</b>	<b>109,92</b>
5.1.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.632.179.988.000,00	1.626.314.998.321,00	99,64
5.1.02	Dana Alokasi Khusus (DAK)	739.173.862.000,00	725.318.951.391	98,13
5.1.05	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	-	-	-
5.1.06	Dana Insentif Daerah	-	-	-

<b>5.2</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>320.575.000,00</b>	<b>76,35</b>
5.2.02	Pendapatan Hibah	420.000.000,00	320.676.000,00	76,35
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.238.523.726.031,00</b>	<b>3.030.373.755.716,66</b>	<b>93,57</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.495.343.443.824,03</b>	<b>2.350.460.892.692,66</b>	<b>94,19</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.150.527.603.340,03	1.121.598.940.759,05	97,49
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	969.160.341.927,00	863.748.702.320,61	89,12
5.1.03	Belanja Bunga	1.011.374.216,00	758.530.701,00	75,00
5.1.04	Belanja Subsidi	786.430.000,00	667.985.830,00	84,72
5.1.05	Belanja Hibah	369.712.384.341,00	360.292.649.810,00	97,45
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.143.310.000,00	3.394.083.272,00	81,92
<b>5.3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>439.678.656.616,00</b>	<b>384.180.471.213,00</b>	<b>87,38</b>
5.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.3.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.591.999.305,00	75.264.290.543,00	87,93
5.3.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.112.859.661,00	207.105.737.214	86,61
5.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.147.301.950,00	100.659.192.956,00	88,96
5.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.644.895.700,00	1.003.620.500,00	61,01
5.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	179.600.000,00	147.630.000,00	82,20
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>77.331.000,00</b>	<b>5,16</b>
5.3.01	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	77.331.000,00	5,16
<b>5.4</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>302.003.625.590,97</b>	<b>295.655.060.811,00</b>	<b>99,99</b>
5.4.01	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	302.003.625.590,97	295.655.060.811,00	99,99
5.4.02	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	302.003.625.590,97	295.655.060.811,00	99,99
5.4.03	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	-	-
5.4.04	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah	-	-	-
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>38.355.869.615,00</b>	<b>51.247.855.174,01</b>	<b>133,61</b>

<b>6.1</b>	<b>PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>98.316.356.017,00</b>	<b>98.370.079.274,76</b>	<b>100,05</b>
	Penggunaan SILPA	98.316.356.017,00	98.370.079.274,76	100,05
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>136.672.225.632,00</b>	<b>136.672.225.632,00</b>	<b>100,05</b>
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-
6.2.2.02	<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri</b>	136.672.225.632,00	136.672.225.632,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	38.355.869.615,00	38.302.146.357,24	99,86
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	-	<b>12.945.708.816,77</b>	

## 5. INOVASI DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi, Pemerintah Provinsi Maluku memiliki inovasi daerah yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	PELITA SI TANI	PELITA SI TANI yaitu Pelibatan Stakeholder dalam Pembiayaan Petani. Bentuk Inovasi : pelayanan publik, Jenis Inovasi : Non Digital Manfaat Inovasi : 1. Tersedianya SOP pelaksanaan KUR pertanian dan asuransi petani; 2. Terbentuknya Fasilitator Keuangan Mitra Tani; 3. Terlaksananya Perjanjian Kerjasama lintas stakeholder dalam mendukung pembiayaan petani (KUR Pertanian dan Asuransi Tani).
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	EMON DAN EVA PAKE BATIK	EMON DAN EVA PAKE BATIK merupakan salah satu inovasi yang berkaitan dengan data TIK. Bentuk Inovasi : Inovasi pelayanan publik Jenis Inovasi : Non Digital Manfaat Inovasi : 1. Diperolehnya data tentang perkembangan TIK di satuan pendidikan;

			2. Data yang diperoleh dijadikan sebagai bahan dalam mengembangkan program kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan yang berbasis TIK.
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	TUNGKU	<p>TUNGKU yaitu Transformasi Perpustakaan Negeriku</p> <p>Bentuk Inovasi : Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah</p> <p>Jenis Inovasi : Non Digital</p> <p>Manfaat Inovasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Maluku;</li> <li>2. Meningkatkan pembudayaan gemar membaca masyarakat Maluku</li> </ol>
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku	SIPANDU BPBD	<p>SIPANDU BPBD yaitu Sistem Pendataan Arsip Aman dan Terpadu BPBD Provinsi Maluku.</p> <p>Bentuk Inovasi : Inovasi tata kelola pemerintahan daerah</p> <p>Jenis Inovasi : Digital</p> <p>Manfaat Inovasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi kebutuhan ruang fisik dan biaya terkait pemeliharaan arsip;</li> <li>2. Arsip yang tersimpan secara digital dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, selama ada koneksi internet;</li> <li>3. Memudahkan pelacakan riwayat dokumen dan audit jika diperlukan;</li> <li>4. Laporan terkait pengelolaan arsip dengan cepat dan akurat;</li> <li>5. Dengan akses cepat dan tepat ke arsip yang relevan, BPBD dapat mengambil keputusan yang lebih informatif dan berdasarkan data, terutama dalam situasi bencana yang</li> </ol>

			membutuhkan respons cepat.
5.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku	SE BATUL	SEBATUL yaitu Sistem Kenaikan Jabatan Fungsional Bentuk Inovasi : Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Jenis Inovasi : Digital Manfaat Inovasi : Pelayanan kepegawaian lebih efisien, sistematis dan terkontrol melalui digitalisasi manajemen ASN
6.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	MANTAP	MANTAP yaitu Mari Taat Melapor Bentuk Inovasi : Inovasi Pelayanan Publik Jenis Inovasi : Digital Manfaat Inovasi : 1. Menjadi aplikasi yang efektif dan efisien bagi penanggungjawab usaha/kegiatan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL/RKL-RPL 2. Menjadi media penyampaian informasi bagi instansi Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melakukan pengawasan tidak langsung bagi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pelaku usaha.
7.	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	TIPA PETANG	TIPA PETANG adalah Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Hutan Lindung. Bentuk Inovasi : Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Jenis Inovasi : Non Digital Manfaat Inovasi : 1. Sebagai sarana penelitian bagi dunia pendidikan; 2. Mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku	WALANG DUKCAPIL	WALANG DUKCAPIL merupakan inovasi berbagi informasi. Bentuk inovasi : Inovasi Pelayanan Publik Jenis inovasi : Digital Manfaat Inovasi : 1. Bagi Dinas, website menjadi profil dinas, sarana berbagi informasi (file hasil produk dinas, berita urusan kependudukan, dsb), media komunikasi, dan wadah komunitas; 2. Bagi masyarakat, website dapat berfungsi sebagai sarana informasi, mengakses layanan publik, sarana komunitas dan media untuk melakukan aksi sosial.
--	-----------------	--

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 ini disusun sebagai suatu kewajiban konstitusional dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Maluku dan merupakan suatu wujud pertanggungjawaban transparan kepada masyarakat.

Ambon, 27 Maret 2025

**Pj. Gubernur Maluku**



**Ir. SADALI IE, M.Si, IPU**